

Demokratisasi Kelas Menengah?

Oleh Ariel Heryanto

PENCEKALAN sebuah seminar pada masa ini sudah bukan kejutan lagi. Apalagi untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi, apa yang terjadi minggu ini di Yogyakarta mungkin bisa menjadi tonggak bersejarah bagi riwayat perjuangan demokratisasi kelas menengah, khususnya kaum jurnalis di Indonesia.

FDWY ancaman bagi PWI?

Sebuah seminar tentang "Delik Pers" akan diadakan di Yogyakarta pada Sabtu, 4 September 1993. Seminar itu nyaris batal. PWI Yogyakarta mengimbau kepolisian setempat agar menunda memberikan izin. Alasannya, panitia seminar dianggap sebagai organisasi ilegal, bahkan mengancam PWI. Izin dari kepolisian baru dikeluarkan 25 Agustus, setelah tanggung jawab penyelenggaraan diambil-alih oleh Ikadin Yogyakarta.

Siapakah panitia awal yang dicurigai oleh pihak PWI Yogyakarta itu? Secara formal, mereka menamakan diri Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY). Anggotanya beberapa puluh wartawan berusia muda dari berbagai media massa lokal maupun nasional, ditambah beberapa pengamat profesional di bidang jurnalisme. Sebagian besar tokoh-tokoh terkemuka, enerjetik, profesional, dan berpengaruh di Yogyakarta, yang kerjanya berkaitan dengan jurnalisme, tergabung dalam FDWY ini.

FDWY merupakan fenomena yang sangat menarik dan penting dalam dinamika politik kelas menengah Indonesia. Dengan atau tanpa terjadinya pengekalan seminar 4 September itu, FDWY memang layak dipertimbangkan. Tentu bukan hanya oleh PWI Yogyakarta. Sebagai pengamatan saya yang minim, kelompok seperti

FDWY tidak ada di kota-kota lain. Bukan tanpa sebab, tentunya.

Perkembangan pers mutakhir

Sejarah pers di masa Orde Baru ini ditandai oleh tiga hal yang saling berkait.

Pertama, melonjaknya industri pers yang terungkap secara kuantitatif dalam jumlah tiras. Menurut catatan David Hill (1992), peningkatan itu terutama terjadi di tahun 1980-an, dari 5 juta (1978) menjadi dua kali lipat di akhir dekade 1980-an. Jumlah itu masih meningkat menjadi 11,7 juta di akhir 1990, dan naik lagi di atas 13 juta pada tahun 1991.

Kedua, peningkatan jumlah bacaan dan pembaca pers kita disertai oleh merosotnya jumlah terbitan, apalagi penerbit. Dari sekitar 283 terbitan (1975) menjadi 256 (1986), dan sedikit naik menjadi 270-an di tahun 1990-an ini. Kedua gejala di atas menunjukkan, bahwa pers Indonesia menjangkau semakin banyak orang. Tetapi, orang banyak ini semakin sedikit pilihannya dalam hal apa yang dapat dibaca.

Ketiga, kedua gejala di atas berlangsung sebagai akibat langsung dan tak langsung dari kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. Kebijakan itu menekankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi makro meningkatkan kebutuhan promosi periklanan yang menjadi salah satu sumber utama kejayaan penerbit. Stabilitas politik menggetatkan batas apa yang boleh diterbitkan dalam pers, siapa yang boleh menjadi wartawan, serta bagaimana asosiasi penerbit/wartawan harus dilembagakan.

Merosotnya jumlah penerbitan disebabkan baik oleh per-

saingan ekonomi maupun pembreidelan dengan alasan politik. Pers dan khalayak luas tidak lagi menjadi agen yang mengontrol kekuasaan, tetapi dikontrol kekuasaan. Ungkapan "pers sebagai kontrol sosial" menjadi tepat, seperti makna aslinya dalam bahasa asing.

Pertumbuhan kelas menengah

Salah satu akibat dari "pembangunan" di Indonesia seperti di negeri-negeri lain, ialah menguatnya apa yang secara longgar dapat disebut kelas menengah. Istilah "menguat" mungkin berlebihan. Nyatanya kaum terpelajar dan profesional kota yang biasa digolongkan kelas menengah, masih sangat rapuh sebagai kolektif ekonomi, apalagi politik. Dibandingkan dengan rekannya di negeri-negeri tetangga Asia Tenggara, kaum kelas menengah Indonesia sering dinilai para pengamat masih lebih lemah.

Terlepas dari kenyataan itu, sulit dibantah, bahwa dalam seperempat abad ini telah terjadi pertumbuhan jumlah kaum terpelajar dan tenaga profesional Indonesia. Mungkin tidak terlihat proses ke arah membulatnya mereka sebagai suatu kelas menengah yang kokoh. Mereka sangat majemuk dan berkeping-keping. Ada yang oportunis, banyak yang konservatif, tapi ada juga yang idealis progresif. Di antara sesama minoritas progresif masih ada yang tersekat tembok-tembok primordial.

Gejala yang mirip terjadi di sebagian terbesar masyarakat di dunia ini. Kuranglah adil jika orang menilai watak kelas menengah Indonesia masa kini secara serba negatif dan pesimis. Ini biasanya dilakukan dengan meromantisir secara berlebih-

an patriotisme kelas menengah Indonesia di masa lampau atau di negara lain.

Kita telanjur menelan propaganda yang romantis tentang perjuangan wartawan Indonesia di masa-masa lampau, atau wartawan asing. Akibatnya mudah bagi kita untuk mengangap wartawan Indonesia masa kini sebagai kaum yang lebih rendah martabatnya.

Seperti di beberapa bidang lain, jumlah jurnalis profesional muda di Indonesia meningkat secara menakjubkan dalam beberapa tahun belakangan. Bahkan pada dekade ini telah terjadi apa yang tak terbayangkan pada masa sebelumnya: wartawan menjadi primadona yang diperebutkan dan dibajak. Mirip bintang artis, olahragawan, atau manajer yang sakti.

Para jurnalis muda ini bisa mempunyai watak politik dan ambisi ekonomi yang berbeda-beda. Tapi, dalam satu hal mereka mirip. Mereka berpijak pada profesionalisme modern yang rasional sebagai modal kerja, bersaing, dan etika bermasyarakat. Paling tidak secara formal. Komitmen politik dan kualitas moral mereka beraneka, seperti warga masyarakat yang lain. Tapi, berbeda dari kebanyakan orang, kaum jurnalis ini mempunyai kekuatan sosial yang sangat ditakuti, minimal diperhitungkan jika tak dapat dijinakkan para penguasa ekonomi dan politik.

Pertumbuhan kekuatan yang ditakuti ini ternyata belum mendapatkan pengakuan dan penghargaan formal dalam pranata stabilitas ekonomi dan keamanan politik. Akibatnya, ketegangan sulit dielakkan. Regulasi semacam SIUPP atau lembaga korporatis semacam PWI lebih mudah ditelan para jurnalis dari generasi terdahulu. Restriksi semacam itu jelas lebih mendasar dan serius ketimbang "Delik Pers" yang akan diseminarkan di Yogyakarta.

Embrio kemandirian profesi?

Terbentuknya FDWY dapat dimaklumi dalam konteks demikian. Ia hadir bukan untuk mendukung PWI, tetapi juga bukan pertama-tama untuk meniadakan PWI. Yang dirindukan agaknya hanyalah sebuah alternatif yang memungkinkan kemajemukan dan kemitraan setara dalam berorganisasi. Tetapi, justru kemajemukan, seperti halnya kesetaraan dan keterbukaan, merupakan ancaman dalam logika korporatisme, yang mengutamakan kepatuhan, hierarki, sentralisme, dan ketunggalan.

FDWY mengingatkan kita akan bertumbuhnya kelompok-kelompok diskusi mahasiswa Indonesia pasca-1978 di paruh pertama 1980-an. Mereka bertumbuh secara swasta di luar BKK, lembaga yang disahkan pemerintah seperti PWI. Perbandingan ini mungkin layak diteruskan. Mereka sama-sama menjadi bagian dari kelas menengah yang punya sejarah radikalisme progresif cukup panjang. Beberapa pertanyaan berikut, layak dikemukakan.

Radikalisme intelektual para mahasiswa dalam diskusi kelompok bertransformasi menjadi gerakan demonstrasi antar-kota sejak akhir 1980-an. Apakah asosiasi profesional "swasta" semacam FDWY akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih substansial? Apa wujudnya? Semacam front pembelaan kaum profesional menghadapi tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang dianggap irasional? Menjadi alternatif bukan saja bagi PWI, tetapi juga SPSP?

Angan-angan itu mungkin terlalu muluk. Ini ditentukan beberapa masalah lain. Apakah akan bermunculan kelompok lain semacam FDWY di luar Yogya, seperti yang dilakukan mahasiswa? Apakah upaya kaum jurnalis ini akan didukung sesama kelas menengah yang progresif, selain Ikadin? Minimal mahasiswa?

* **Ariel Heryanto**, staf pengajar pada Univ. Kristen Satya Wacana, Salatiga.